



The Contribution of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to Community Welfare in Jambi City, 2020–2025

Yudha Saputra^{*1}, Dhefarell Jalingga², Dicky Setiawan³, Aminah Ramalia⁴

^{*} yudhasputra12@gmail.com¹, dhefareljalingga@gmail.com²,
dickysetiawan.djb@gmail.com³, aminahramalia@unja.ac.id⁴

¹²³⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jambi, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRACT

This research looks at how cooperatives and small businesses in Jambi City have helped improve the well-being of the community between the years 2020 and 2025. This study looks at how poverty and economic inequality continue to exist even though the country's economy has been growing in a positive way. The research method used is a qualitative descriptive approach, which focuses on understanding a phenomenon thoroughly by closely examining the actual situation. Studies show that cooperatives and small and medium-sized businesses help improve the well-being of communities by providing jobs, boosting income, and supporting the local economy. However, this contribution hasn't reached its fullest potential because of some challenges, like not having enough money to invest, not having skilled enough workers, not having good access to markets, and not using digital tools properly. This means that even though there are some improvements in community well-being, these benefits are not shared equally, and there are still big differences in wealth and income between different areas. So, to make cooperatives and small businesses play a bigger role in helping the community in a lasting way, it's important to strengthen institutions, train the workforce, and speed up the digital transformation process.

Keywords: cooperatives, micro, small, and medium enterprises, community welfare

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M, 2024). Kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga mencakup pemerataan distribusi pendapatan, akses terhadap layanan dasar, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi, khususnya di negara berkembang yang masih menghadapi berbagai tantangan structural seperti di Indonesia.

Di Indonesia, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan masih menjadi perhatian. Kemiskinan merupakan bentuk permasalahan yang bersifat kompleks, karena pada dasarnya tidak hanya berkaitan tentang pendapatan (Sumarwadi, 2026). Akan tetapi kemiskinan juga mengarah pada aspek rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Berbagai macam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan ternyata tidak memberikan jawaban yang cepat, atau dapat dikatakan sebagai solusi yang mengulur waktu. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2020 sebesar 9,78% dan mengalami peningkatan akibat dampak pandemi. Selanjutnya, angka tersebut berangsur menurun menjadi sekitar 8,57% pada tahun 2024, namun penurunannya cenderung lambat (Sumarwadi, 2026).

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam memperluas akses ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Disisi lain masih terdapat perbedaan antara wilayah barat dan wilayah timur di Indonesia, dimana masing-masing provinsi di wilayah timur secara kestabilan masih terdapat tingkat kemiskinan yang signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor keterbatasan akses dari aspek pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak, sehingga menyebabkan menyebarnya virus kemiskinan ini. Ditengah usaha untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang terbatas salah satu tindakan preventif untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan memastikan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh negeri yaitu memainkan peran penting koperasi, Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemanfaatan ini terciptanya seluruh sumber daya yang tersedia dan perencanaan serta pengembangan ekonomi daerah, pemerintah dan semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam mencapai pembangunan ekonomi. Menurut Syata, pertumbuhan ekonomi adalah perluasan aktivitas ekonomi suatu negara, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi di dalam masyarakat (Syata, 2025). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dan berkontribusi sekitar 60% terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM menjadi peran penting dalam pertumbuhan ekonomi termasuk dalam meningkatkan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan (Kholifah, A. N., & Andini, C. T, 2024).

Koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang mampu memperkuat akses pembiayaan, distribusi barang, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya adalah individu atau badan hukum yang terlibat dalam kegiatan koperasi, berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, dan merupakan gerakan ekonomi populer yang berlandaskan prinsip keluarga (Safitri, 2025). Koperasi tidak hanya mengandalkan kepada keuntungan semata, melainkan kepada peningkatan kesejahteraan anggota melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Kontribusi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala masih ada, seperti akses terbatas terhadap pembiayaan formal, tingkat literasi keuangan yang rendah, dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan inovasi. Selain itu, banyak koperasi masih belum dikelola secara profesional, sehingga kinerja mereka tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan anggotanya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan peran aktual yang dimainkan oleh koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi termasuk salah satunya dihadapi di Jambi.

Kota Jambi memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor UMKM serta didukung oleh keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi lokal. Berdasarkan data dari surat kabar dari *jambilink.id* menyebutkan bahwa pada tahun 2024 terjadinya peningkatan jumlah UMKM mencapai 176.051 unit yang mana sebelumnya 165.497 unit pada tahun 2021.. Sementara itu, kondisi koperasi aktif juga berperan dalam menyediakan layanan simpan pinjam dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat di Jambi. Dalam periode 2020 hingga 2025, kondisi ekonomi daerah ini mengalami dinamika yang signifikan, terutama akibat dampak pandemi yang menekan aktivitas ekonomi, diikuti dengan proses pemulihan yang menuntut peningkatan daya saing dan produktivitas usaha.

Meskipun demikian, tidak semua koperasi dan UMKM di Kota Jambi mampu berkembang secara optimal. Sebagian pelaku UMKM masih menghadapi penurunan pendapatan, keterbatasan akses pasar, serta kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Di sisi lain, peran koperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi anggota belum sepenuhnya efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontribusi koperasi dan UMKM benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi.

Selain itu, penelitian yang secara komprehensif mengkaji kontribusi koperasi dan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi pada periode 2020-2025 masih terbatas, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada salah satu sektor saja, sehingga belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran kedua sektor tersebut secara simultan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan empiris yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis KONTRIBUSI KOPERASI DAN UMKM TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA JAMBI PADA PERIODE 2020-2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan tinjauan ekonomi kerakyatan serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan langsung terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Metode kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terpadu serta analisis yang bersifat induktif.

Mulyana menjelaskan bahwa metodologi merupakan serangkaian proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati suatu permasalahan serta menemukan jawabannya (Mulyana, 2024). Sejalan dengan itu, Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, serta menekankan pada makna dibandingkan generalisasi hasil (Yulianah, 2022).

Penelitian kualitatif ini berfokus pada upaya penelitian berjudul “*Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jambi Tahun 2020-2025*”, pendekatan kualitatif diarahkan untuk memahami secara mendalam peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menelaah dinamika aktivitas ekonomi, pola pemberdayaan, serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat tanpa mengubahnya ke dalam bentuk data numerik. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kontribusi koperasi dan UMKM, karakteristik pelaku usaha, serta hubungan antara aktivitas ekonomi tersebut dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi selama tahun 2020-2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Koperasi dan UMKM di Jambi Tahun 2020-2025

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Alfaris, 2022). Pada kenyataannya regulasi tersebut, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria *aset* dan *omzet* usaha. Usaha mikro umumnya memiliki keterbatasan modal dan dikelola secara sederhana, usaha kecil mulai menunjukkan struktur manajemen yang lebih tertata, sedangkan usaha menengah memiliki kapasitas produksi dan akses pasar yang lebih luas. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, fleksibel terhadap perubahan pasar, serta menjadi sumber utama penghidupan masyarakat (Nurhidayanti, 2025).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mimin Nurhidayanti ditemukan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat sambil meredam tekanan pengangguran. Saat perusahaan-perusahaan besar ramai-ramai memangkas karyawan dikarenakan permintaan global yang merosot, UMKM menjadi ruang penyelamat dengan menampung para pekerja yang terdampak PHK (Nurhidayanti, 2025). Dari pengamatan langsung di lapangan, kebanyakan pelaku UMKM berjuang keras mempertahankan karyawannya, meski harus menggunakan pola gaji yang lebih lentur. Hal ini menandakan bahwa UMKM tidak cukup perihal ekonomi semata, tapi juga berfungsi sebagai penyangga sosial yang menjaga kesejahteraan warga di level lokal. Oleh sebab itu, keberlangsungan UMKM berdampak langsung ke kestabilan ekonomi keseluruhan, karena ikut serta dalam menekan angka pengangguran sekaligus memelihara pengeluaran rumah tangga.

Sementara itu, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum lainnya, yang didirikan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian, yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum (Maryam, 2025). Koperasi bertindak sebagai tempat berkumpulnya dan menyalurkan kekuatan ekonomi anggotanya, seperti menyimpan dan mengambil pinjaman, melakukan produksi, serta mendistribusikan barang. Dengan mengandalkan partisipasi anggota, koperasi mampu menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata dan memperkuat ikatan persaingan sosial. Pada aspek pembangunan daerah, UMKM dan koperasi memiliki hubungan yang sangat erat. UMKM berperan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi nyata, sedangkan lembaga koperasi berfungsi sebagai pendukung yang menyediakan akses permodalan, penguatan kelembagaan, serta jaringan distribusi. Kerja sama antara keduanya sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan bisa berkelanjutan (Gea, W. U., Nikira, N., Khairulnisa, K., & Hayati, F, 2025).

Di Kota Jambi, pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi selama 5 tahun terakhir, yaitu 2020 sampai 2025, menunjukkan perubahan yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara keseluruhan serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pada tahun 2020, jumlah usaha kecil menengah di Jambi diperkirakan mencapai sekitar 160.000 unit, dan usaha mikro mendominasi dengan lebih dari 85% dari total tersebut (Susanti, 2025). Sementara itu, terdapat sekitar 3.200 unit koperasi yang terdaftar, meskipun tidak semua di antaranya aktif. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk sekitar 30% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan (Trisilia, 2020). Selain itu, jumlah koperasi yang masih beroperasi juga berkurang karena partisipasi anggotanya terbatas.

Selama masa pemulihan tahun 2022 hingga 2025, jika ditinjau dari tahun 2023 terjadinya persaingan antar usaha kecil menengah di Kota Jambi semakin sengit karena semakin banyaknya jumlah UMKM yang berdiri banyaknya pelaku usaha. Hal ini membuat pelaku UMKM harus mampu merancang strategi bisnis yang inovatif agar usaha kecil dan menengah bisa tumbuh dengan cepat, sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Di tahun 2023, jumlah UMKM di Kota Jambi mencapai 176.051 unit. Di Kota Jambi banyak UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha dan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut terus berubah sehingga bisa diprediksi populasi pengusaha UMKM di Jambi pada tahun 2023 akan mengalami perubahan pertumbuhan. Jumlah data terbanyak adalah jumlah usaha mikro kecil menengah di Kota Jambi yang mencapai 47.712 unit usaha (Talitha, 2025).

No	Kecamatan	Jumlah UMKM tahun 2023 (unit)
1	Kerinci	7.468
2	Merangin	7.546
3	Sarolangun	2.627
4	Batanghari	17.673
5	Muaro Jambi	41.234
6	Tanjung Jabung Timur	19.046
7	Tanjung Jabung Barat	8.698
8	Tebo	8.370
9	Bungo	3.614
10	Kota Jambi	47.712
11	Kota Sungai Penuh	9.028
Provinsi Jambi		176.051

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, 2024.

Jumlah usaha mikro kecil menengah terus bertambah setiap tahunnya, meskipun jumlah usaha mikro kecil menengah semakin bertambah, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi. salah satunya adalah masalah pemasaran hasil produksi. Sehingga diperlukan pelatihan dan bantuan terus-menerus dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan daya saing para pelaku usaha mikro kecil menengah di masa ekonomi digital saat ini. Masalah tersebut meliputi keterbatasan dana, kesulitan dalam pemasaran, dan persaingan yang sangat ketat berdasarkan data Kadin Indonesia tahun 2023, sekitar 8% dari 59,2 juta (Naseer, 2025).

Usaha mikro kecil menengah di Indonesia sudah mulai memakai teknologi yang berbasis digital, kendala poin utama dalam menggunakan promosi secara online adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha, khususnya di daerah terpencil yang juga menghadapi masalah keterbatasan akses sinyal. Padahal, promosi produk melalui platform digital dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM, terutama dalam memasarkan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Namun demikian, penggunaan teknologi digital oleh UMKM tidak bisa dipisahkan dari berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Banyak pelaku UMKM yang masih dibutuhkan pelatihan agar bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya mulai dari penggunaan perangkat digital hingga strategi pemasaran online yang efektif.

Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, juga sangat penting lembaga pendidikan dan komunitas bisnis sangat diperlukan untuk mempercepat proses digitalisasi usaha mikro kecil menengah, sehingga para pelaku usaha mikro kecil menengah

dapat berkompetisi di pasar yang semakin kompetitif. Kolaborasi dan sinergi antar-stakeholder menjadi kunci dalam mengatasi hambatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai wilayah. Salah satu bukti dari perkembangan tersebut melalui internet, yang juga disebut sebagai penjualan online (*online shop*), dilakukan oleh para pelaku bisnis.

Usaha kecil menengah di Kota Jambi menggunakan smartphone dan media sosial untuk memasarkan barang atau layanan agar lebih dikenal dan disukai oleh banyak orang berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM), jumlah UMKM di Indonesia pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta, sehingga secara mengalami pertumbuhan ekonomi yang sehat (DTI, 2025). Jumlah koperasi yang masih beroperasi juga naik menjadi sekitar 308 di Kota Jambi pada tahun 2024. Sektor perdagangan dan kuliner menjadi bagian utama dari aktivitas UMKM, sedangkan koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang paling pesat berkembang karena kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang tinggi (Kenali.CO.ID, 2025).

Disisi lain, perkembangan ini belum sepenuhnya merata, sebagian besar usaha mikro kecil menengah masih berada di wilayah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Selain itu, masalah seperti kurangnya pemahaman tentang teknologi digital, sedikitnya ide baru dalam produk, serta pengelolaan bisnis yang belum baik masih menghalangi upaya meningkatkan kemampuan bersaing (N Vega, 2026)

Oleh karenanya, meskipun jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi di Jambi terus meningkat, masalah utama masih terkait dengan kualitas pengelolaan, kesetaraan dalam pertumbuhan, serta pemanfaatan peran yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi hal yang penting dalam menilai seberapa besar kontribusi koperasi dan UMKM dalam memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Jambi.

Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Jambi

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk usaha yang penting dalam pilar pembangunan perekonomian di Indonesia. Koperasi dan UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena berperan dalam menyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan ikut serta dalam proses pembagian manfaat pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pengusaha dan memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya di Kota Jambi.

Strategi pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi berbagai isu strategis dan tantangan di masa depan yang lebih kompleks. Sehingga baik koperasi maupun usaha mikro kecil menengah harus mampu untuk bersaing dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri. Pembangunan di Kota Jambi saat ini difokuskan pada upaya pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat masyarakat sebagai contoh Wali Kota Jambi yaitu Bapak Dr.dr.H.Maulana, M.K.M meresmikan Sentra Kuliner di Kec. Danau Sipin.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dijabarkan terkait kontribusi koperasi dan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Jambi, dapat dilihat dari beberapa aspek penting, seperti pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, akses ke sumber daya ekonomi, dan penguatan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

Pertama, dari segi pembukaan lapangan kerja, UMKM terbukti menjadi sektor yang paling utama dalam menyerap tenaga kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah menyerap lebih

dari 97 % tenaga kerja di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro kecil menengah memainkan peran penting dalam mengurangi angka pengangguran dan membantu meningkatkan penghasilan masyarakat. Dalam hal kesejahteraan, meningkatnya kesempatan bekerja akan membentuk kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup secara umum.

Kedua, koperasi membantu masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap dana pinjaman dan pembagian kekayaan secara ekonomi. Koperasi simpan pinjam memberikan pilihan pembiayaan yang lebih mudah diperoleh oleh masyarakat dibandingkan lembaga keuangan resmi. Ini sangat penting terutama bagi para pengusaha UMKM yang sering menghadapi masalah dalam mendapatkan modal untuk berkembang. Dengan adanya akses pembiayaan yang lebih inklusif, para pelaku usaha bisa meningkatkan jumlah produksi, memperluas bisnis mereka, dan meningkatkan penghasilan mereka. Dalam teori ekonomi kelembagaan, peran koperasi ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mengatasi kegagalan pasar, terutama dalam hal kesulitan memperoleh sumber daya keuangan.

Ketiga, peran koperasi dan usaha mikro kecil menengah juga terasa dalam naiknya pendapatan warga. Usaha yang dilakukan oleh UMKM menjadi penghasil pendapatan utama bagi banyak keluarga, khususnya di daerah pedesaan. Sementara itu, koperasi memberi manfaat ekonomi langsung kepada anggotanya dengan cara membagikan hasil usaha yang tersisa serta memberikan layanan ekonomi lainnya. Kenaikan penghasilan dari usaha serta manfaat ekonomi yang diperoleh melalui koperasi akan meningkatkan kemampuan beli masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Keempat, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan dalam memperkuat ekonomi lokal. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kedua sektor tersebut biasanya bergantung pada potensi lokal, baik dalam hal sumber daya maupun tenaga kerja. Ini membuat dampak ekonomi yang saling memperkuat, di mana naiknya kegiatan ekonomi di satu bidang akan mendorong pertumbuhan di bidang lainnya. Dalam jangka panjang, memperkuat ekonomi daerah akan membentuk sistem ekonomi yang lebih kuat dan ramah lingkungan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

Permasalahannya terletak Keterbatasan akses ke teknologi, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan kurangnya kemampuan dalam mengelola usaha masih menjadi hambatan utama. Selain itu, tidak semua koperasi dapat bekerja dengan baik karena masalah dalam pengelolaan dan rendahnya keikutsertaan anggotanya. Kondisi ini menyebabkan peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum bisa berjalan dengan optimal.

Di Kota Jambi, peran koperasi dan usaha mikro kecil menengah semakin penting dalam mendorong pemulihan ekonomi, terutama pada tahun 2020 hingga 2025. Pandemi membuat ekonomi sulit, sehingga banyak orang beralih bekerja di usaha kecil dan menengah untuk menghidupi keluarga. Di sisi lain, koperasi diharapkan bisa bantu kegiatan ekonomi itu dengan cara memberi pinjaman dan menyalurkan barang. Namun, keberhasilan peran tersebut tetap tergantung pada kemampuan lembaga dan bantuan kebijakan yang ada.

Secara umum, koperasi dan UMKM memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembuatan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, serta memperkuat perekonomian daerah. Namun, agar kontribusi tersebut dapat berkembang dengan lebih optimal, dibutuhkan upaya memperkuat lembaga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta adanya kebijakan yang lebih spesifik dan berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah bisa bekerja dengan baik sebagai alat utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kendala dan Implikasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Jambi

Ditengah koperasi dan usaha mikro kecil menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi, upaya mereka dalam memberikan kontribusi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural dan operasional. Kendala ini tidak hanya berdampak pada kinerja koperasi dan UMKM, tetapi juga memengaruhi langsung tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya kemampuan mendapatkan dana. Banyak pengusaha UMKM masih merasa sulit untuk mendapatkan modal usaha dari bank atau lembaga keuangan karena persyaratan yang terlalu banyak dan rumit. Di sisi lain, tidak semua koperasi mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal karena keterbatasan modal dan lemahnya kemampuan dalam mengelola risiko. Kondisi ini menghambat pertumbuhan usaha, mengurangi hasil kerja, dan membatasi kemungkinan meningkatnya penghasilan masyarakat.

Kendala berikutnya adalah kurangnya kualitas tenaga kerja. Beberapa pengusaha UMKM masih mengalami kendala dalam hal pengelolaan bisnis, pemahaman tentang keuangan, serta penggunaan teknologi. Ini menyebabkan usaha menjadi tidak efisien, produk kurang inovatif, dan daya saing di pasar menjadi lemah. Di koperasi, keterbatasan kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi memengaruhi efisiensi kelembagaan, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum mencapai tingkat optimal.

Selain itu, terbatasnya akses ke pasar juga menjadi hambatan yang cukup besar. Banyak usaha kecil menengah masih mempertahankan bisnis mereka hanya di pasar lokal dengan cakupan yang tidak terlalu luas. Kurangnya penggunaan jaringan penjualan modern membuat produk usaha kecil menengah sulit untuk bersaing, baik dalam hal harga maupun kualitas. Koperasi yang seharusnya menjadi jembatan antara produsen dan konsumen masih belum bisa menjalankan perannya dengan baik dan efektif.

Kendala lain yang semakin penting dalam masa kini ekonomi digital adalah kemampuan UMKM yang masih rendah dalam menggunakan teknologi digital. Meskipun kemajuan teknologi informasi telah memberi peluang lebih besar untuk memasarkan bisnis melalui platform digital, banyak usaha kecil dan menengah masih belum bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum sama rata, khususnya di daerah-daerah. Keterbatasan dalam memahami digital, akses ke internet, dan kemampuan dalam melakukan pemasaran online menjadi penghalang utama.

Kurangnya pemanfaatan digitalisasi ini membuat jangkauan pasar menjadi terbatas dan efisiensi operasional menjadi rendah. UMKM yang belum terhubung dengan platform digital cenderung mengalami penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha yang sudah menggunakan teknologi. Selain itu, pembatasan penggunaan sistem digital juga memperlambat akses terhadap informasi pasar, inovasi produk, serta kesempatan kerja sama. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan daya saing usaha mikro kecil menengah dan menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari pandang koperasi, digitalisasi masih terasa sulit dihadapi. Banyak koperasi masih belum menggunakan sistem manajemen yang didasarkan pada teknologi, sehingga layanan yang diberikan kepada anggota kurang efisien dan tidak transparan. Padahal, dengan menerapkan digitalisasi, koperasi bisa lebih transparan, layanan yang diberikan bisa mencapai lebih banyak orang, serta peran koperasi dalam membantu UMKM bisa menjadi lebih kuat.

Implikasi dari berbagai kendala tersebut terlihat pada terbatasnya pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun koperasi dan usaha mikro kecil menengah bisa memberi pekerjaan, tingkat kesejahteraan yang mereka hasilkan masih kurang memuaskan. Pendapatan rakyat tidak naik secara signifikan, kemampuan beli tetap terbatas,

dan kesenjangan ekonomi masih ada karena adanya perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan teknologi.

Di Kota Jambi sendiri tantangan dalam pemanfaatan digitalisasi UMKM semakin menjadi perhatian utama pada periode 2020 hingga 2025, terutama setelah dampak pandemi yang mendorong percepatan transformasi digital. Usaha kecil menengah yang bisa mengikuti perkembangan teknologi digital cenderung lebih awet dan bisa tumbuh, sedangkan usaha yang tidak bisa mengikuti teknologi digital justru mengalami penurunan dalam prestasi usahanya. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam menentukan kelangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM, seperti kurangnya penggunaan teknologi digital, berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis seperti meningkatkan pemahaman tentang teknologi digital, memperkuat sarana dan prasarana teknologi, serta adanya kebijakan yang mendukung perubahan ke arah digital untuk UMKM dan koperasi. Dengan demikian, kedua sektor tersebut bisa bekerja dengan baik sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa koperasi dan usaha mikro kecil menengah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi selama masa 2020 hingga 2025. Kontribusi itu terlihat dari peran dalam membantu menciptakan pekerjaan, meningkatkan penghasilan masyarakat, dan memperkuat perekonomian daerah. UMKM menjadi bagian penting dalam menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, sedangkan koperasi membantu menambah akses pembiayaan serta mendukung berbagai kegiatan ekonomi anggotanya. Namun, kontribusi tersebut masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena beberapa hambatan, seperti akses yang terbatas terhadap pembiayaan resmi, kurangnya kualitas tenaga kerja, kesulitan dalam mencari pasar, serta penggunaan teknologi digital yang masih rendah. Selain itu, masih ada masalah dalam pengelolaan koperasi yang memengaruhi kemampuan organisasi dalam menjalankan perannya.

Implikasi dari kendala tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat belum merata, terlihat dari pendapatan yang tidak banyak naik, kemampuan belanja yang masih terbatas, serta masih ada perbedaan ekonomi di antara berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terencana secara strategis, seperti memperkuat lembaga koperasi, meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM, memperluas akses ke pasar, serta mempercepat proses digitalisasi usaha. Dengan langkah tersebut, diharapkan koperasi dan usaha mikro kecil menengah dapat berjalan dengan baik sebagai alat utama dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat secara adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40-47.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-9.
- Sumarwadi, H., Darwin, D., Yamin, M., & Imran, A. F. (2026). Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Cukup: Pembangunan Manusia dan Dinamika Kemiskinan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 1902-1910.

- Syata, W. M. (2025). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 63-70.
- Kholifah, A. N., & Andini, C. T. (2024). Peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 459-466.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarasmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., ... & Martono, S. M. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Nurhidayanti, M. (2025). Pengaruh UMKM terhadap stabilitas ekonomi di tengah krisis global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1), 22-29.
- Maryam, R. (2025). Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(2), 17-37.
- Gea, W. U., Nikira, N., Khairulnisa, K., & Hayati, F. (2025). Peran Koperasi dalam Mendukung Pengembangan dan Penguatan UMKM: Studi Kasus di Koperasi New Mitra Karya Medan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1217-1221.
- Susanti, N. R. (2025). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL, MODAL USAHA, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN UMKM KULINER DI KOTA JAMBI. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 964-978.
- Trisilia, meilinda. 2020. Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Yang Dirasakan Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. <https://binus.ac.id/malang/2021/08/pandemi-covid-19-dan-dampaknya-yang-dirasakan-oleh-usaha-mikro-kecil-dan-menengah/>. Diakses pada 28 April 2026, Pukul 11:37 WIB.
- Talitha, Mitha. "KINERJA UMKM DIDUKUNG OLEH ORGANIZATONAL AGILITY: KEUNGGULAN KOMPETITIF SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA USAHA KECIL KULINER DI KOTA JAMBI." (2025).
- Naseer, D. P. P., & Pitono, A. (2025). Strategi Pemasaran Digital Berkelanjutan Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Administrasi Jakarta Barat (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Vega, N., Natalia, N., Zai, B., Nasution, A. R., lina Silalahi, N. E., Malau, C. O., & Sibarani, A. (2026). Analisis Inovasi Produk Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 7314-7322.